

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun anggaran 2010. Faktor-faktor yang diteliti berupa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), ukuran pemerintah daerah, pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, tingkat ketergantungan pemerintah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat, terpilihnya kembali kepala daerah sebelumnya, jumlah temuan audit dan opini audit. Ukuran pemerintah daerah diproksikan dengan total realisasi pendapatan dan belanja daerah pada tahun berjalan, Standar Akuntansi Pemerintah yang digunakan adalah Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, opini audit yang diteliti adalah opini selain opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode sampel acak berstrata secara proporsional dan diperoleh sampel sebanyak 217 pemerintah kabupaten/kota. Data yang dipakai adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota tahun anggaran 2010 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Guna membuktikan hipotesis, maka dilakukan pengujian regresi *Ordinary Least Squares* yang diawali dengan uji asumsi klasik.

Pengujian secara statistik atas hipotesis menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, pengalaman pemerintah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah, jumlah temuan audit dan jenis opini audit berpengaruh signifikan terhadap lamanya *audit delay*. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan pengalaman pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah terbukti berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Jumlah temuan audit dan jenis opini audit terbukti berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

Kata kunci: *Audit delay*, Teknologi Informasi, pemerintah daerah, Standar Akuntansi Pemerintah.